

## PENGARUH INFLASI, PENDAPATAN PERKAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI ACEH

Fauzan Auva<sup>1)</sup>, Ahmad Ridha<sup>2)</sup>, Puti Andiny<sup>3)</sup>  
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra

Correspondence		
Email: Fauzanauva544@gmail.com		No. Telp: 083193809459
Submitted 30 Agustus 2025	Accepted 2 September 2025	Published 3 September 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional (UMR) terhadap penerimaan pajak di Aceh periode 1990-2023. Menggunakan data sekunder, penelitian ini menerapkan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa inflasi (p-value 0.8234) dan pertumbuhan ekonomi (p-value 0.8281) secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, pendapatan per kapita (p-value 0.0408) dan UMR (p-value 0.0000) terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak di Aceh. Selanjutnya, uji simultan (uji F) dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000 ( $< 0.05$ ) mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan UMR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak sangat baik, ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.803474. Ini berarti 80.34% variasi pada penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut, sedangkan sisanya 19.66% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

**Kata kunci:** Penerimaan Pajak, Inflasi, Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional

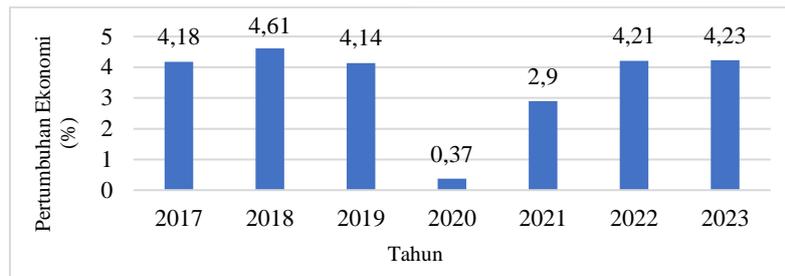
### ABSTRACT

*This study analyzes the influence of inflation, per capita income, economic growth, and the regional minimum wage (RMW) on tax revenue in Aceh during the period 1990–2023. Using secondary data, the research applies descriptive statistical analysis and multiple linear regression. The partial test (t-test) results show that inflation (p-value 0.8234) and economic growth (p-value 0.8281) individually have no significant effect on tax revenue. However, per capita income (p-value 0.0408) and the RMW (p-value 0.0000) are proven to have a significant and positive effect on tax revenue in Aceh. Furthermore, the simultaneous test (F-test) with a Prob(F-statistic) value of 0.000000 ( $< 0.05$ ) indicates that, collectively, inflation, per capita income, economic growth, and the RMW significantly influence tax revenue. The model's explanatory power is strong, as shown by the Adjusted R-squared value of 0.803474. This means that 80.34% of the variation in tax revenue can be explained by the four independent variables, while the remaining 19.66% is explained by other factors outside the research model.*

**Keywords:** Tax Revenue, Inflation, Per Capita Income, Economic Growth, Regional Minimum Wage

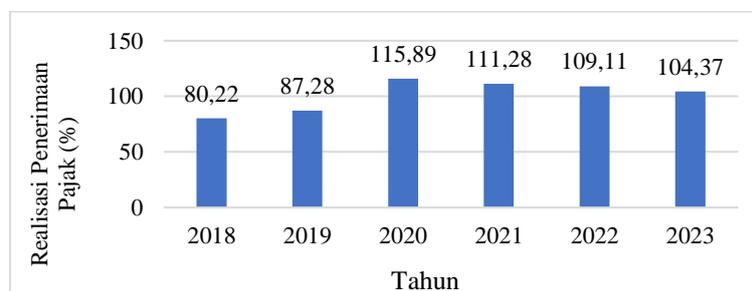
### Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang sangat vital bagi negara Indonesia karena memiliki dua fungsi pokok, yakni fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran menegaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan rutin negara sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Sementara itu, fungsi mengatur menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk memengaruhi pola konsumsi, investasi, serta distribusi pendapatan di masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair dan regulierend (Mardiasmo, 2016). Dengan kontribusi rata-rata sekitar 71% terhadap total penerimaan negara setiap tahunnya, pajak benar-benar menempati posisi sebagai penopang utama keuangan negara. Hal ini juga menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembangunan nasional, baik dari sisi pendanaan program pemerintah maupun stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, keberlangsungan penerimaan pajak memiliki peranan strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Norman, 2016).



Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh (Persen)

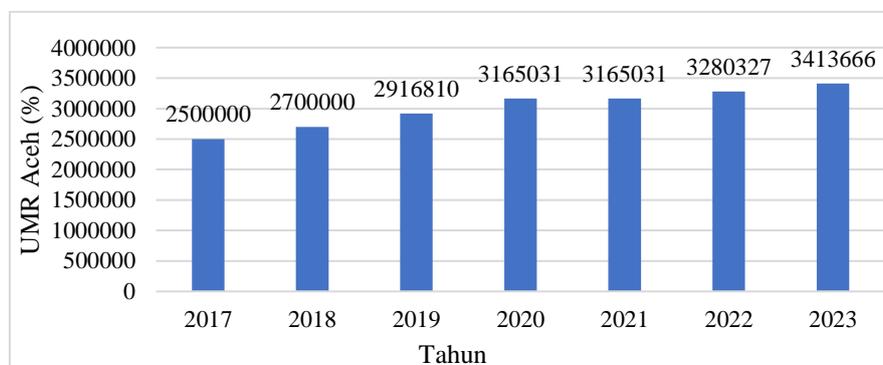
Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni mikro dan makro, di mana keduanya memiliki kontribusi yang berbeda terhadap stabilitas penerimaan negara. Faktor mikro, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak serta resistensi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, sudah banyak menjadi fokus dalam kajian akademik dan kebijakan fiskal. Sebaliknya, faktor makro cenderung kurang diperhatikan karena dampaknya dianggap tidak langsung, padahal justru memiliki potensi pengaruh besar dalam jangka panjang terhadap penerimaan negara. Beberapa faktor makro yang sering dikaitkan dengan penerimaan pajak antara lain adalah inflasi, tingkat pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi (Norman, 2016). Inflasi yang meningkat berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi dan investasi ikut menurun, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari sektor konsumsi maupun pendapatan perusahaan. Sementara itu, kenaikan upah minimum regional dari tahun ke tahun memberikan sinyal positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, peningkatan UMR diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah maupun nasional (Rohadi, 2020).



Gambar2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Aceh 2018 -2023

Kondisi penerimaan pajak di Aceh memberikan gambaran nyata bagaimana dinamika ekonomi daerah memengaruhi kontribusi fiskal. Pada tahun 2020, misalnya, penerimaan pajak Aceh tercatat mencapai 115,89%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menunjukkan besarnya peranan pajak dalam menopang perekonomian. Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa faktor, di antaranya peningkatan aktivitas ekspor pada triwulan kedua yang berdampak pada lonjakan Bea Keluar serta peningkatan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan. Data ini memperlihatkan bahwa peran faktor eksternal mampu memperkuat realisasi penerimaan pajak di Aceh (Kemenkeu, 2020). Namun demikian, setelah tahun 2020, penerimaan pajak di Aceh justru mengalami penurunan tajam sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kontraksi ekonomi yang terjadi menimbulkan peningkatan angka pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, serta berkurangnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kondisi makro seperti pandemi dan dampak turunannya terbukti sangat berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan pajak daerah (Kemenkeu, 2020).

Salah satu faktor makro yang paling sering dikaji dalam hubungannya dengan penerimaan pajak adalah inflasi, karena fenomena ini memengaruhi berbagai aspek ekonomi masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga konsumsi dan investasi menurun, yang akhirnya berdampak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maupun pajak dari sektor perusahaan. Namun, hasil penelitian mengenai hubungan inflasi dengan penerimaan pajak menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda, sehingga masih menjadi perdebatan dalam literatur ekonomi fiskal. Sebagai contoh, Renata menemukan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena harga yang lebih tinggi berkontribusi pada basis pajak yang lebih besar (Renata, 2016). Sebaliknya, Crane dalam Norman menyatakan bahwa inflasi justru berdampak negatif karena menekan daya beli sehingga menurunkan kontribusi pajak dari konsumsi masyarakat. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap pajak sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah maupun kebijakan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun hasil kajian masih beragam, inflasi tetap dianggap sebagai faktor yang berpotensi besar memengaruhi stabilitas penerimaan pajak, termasuk di Aceh (Norman, 2016).



Gambar 3 Pertumbuhan Upah Minimum Regional Aceh (Rp)

Selain inflasi, faktor pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Aceh. Tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah membuat kontribusi pajak masyarakat terbatas, tetapi peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, dapat memperbesar basis pajak karena semakin banyak aktivitas ekonomi yang tercatat. Hal ini sesuai dengan pandangan Rizal yang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (Rizal, 2021). Meski demikian, kondisi di Aceh menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan tren penerimaan pajak, seperti yang terlihat pada tahun 2020 ketika penerimaan pajak meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi menurun. Di sisi lain, kenaikan UMR yang terus terjadi setiap tahun diharapkan mampu meningkatkan konsumsi serta investasi masyarakat yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, kombinasi antara pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan UMR menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan Aceh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah (BPS Aceh, 2023).

### Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Kontribusi ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Waluyo, pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara berdasarkan peraturan dengan sifat memaksa,

sementara Rochmat Soemitro menegaskan bahwa pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada masyarakat. Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Dari berbagai definisi tersebut, terlihat bahwa hak memungut pajak hanya dimiliki negara, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Unsur utama dalam pajak meliputi iuran yang bersumber dari rakyat, dasar hukum yang jelas, sifat tanpa jasa timbal, serta tujuan untuk membiayai rumah tangga negara. Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik yang membedakannya dari pungutan lain yang bersifat sukarela (Waluyo, 2011; Mardiasmo, 2016; Rizal, 2018).

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menegaskan bahwa pajak berperan sebagai sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga sering disebut sebagai tulang punggung keuangan negara. Fungsi *regulerend* menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi, misalnya mendorong investasi atau mengendalikan konsumsi barang tertentu. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kedua fungsi tersebut, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara tetapi juga sarana pengendalian ekonomi. Oleh sebab itu, pemungutan pajak memiliki peran ganda yang strategis dalam pembangunan nasional (Mardiasmo, 2016).

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak adalah seluruh pemasukan negara yang berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Menurut Hutagaol, penerimaan pajak mencerminkan partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak yang dipungut dari masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk penyediaan sarana publik, infrastruktur, keamanan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi pajak terhadap APBN, semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penerimaan pajak bersifat berkelanjutan karena tidak menimbulkan kewajiban pelunasan seperti utang, melainkan menjadi sumber pendapatan yang terus-menerus. Selain itu, pembayaran pajak memiliki nilai politis dan psikologis yang mencerminkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya penerimaan pajak dalam membiayai keberlangsungan pembangunan negara (Hutagaol, 2007).

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak antara lain kepastian hukum, kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas petugas pajak. Kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi konflik interpretasi yang menghambat pemungutan pajak. Kebijakan perpajakan yang tepat mampu menyeimbangkan tujuan fiskal dan pembangunan ekonomi. Sistem administrasi yang efisien memastikan penerimaan dapat berjalan optimal. Selain itu, pelayanan yang baik dari aparat pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang arti penting pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Kualitas petugas pajak menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan kebijakan perpajakan. Keseluruhan faktor tersebut sangat penting untuk menjaga penerimaan pajak agar dapat terus menopang pembangunan (Rahayu, 2015).

### **Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu yang mengurangi daya beli masyarakat. Menurut Jogiyanto, inflasi diukur melalui tingkat perubahan harga secara keseluruhan, sedangkan BPS mendefinisikan inflasi sebagai perkembangan harga barang dan jasa yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dapat terjadi karena kelebihan permintaan atau penambahan jumlah uang yang beredar,

seperti dijelaskan oleh teori kuantitas. Tingkat inflasi dapat bersifat rendah, moderat, hingga sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan persen dalam kondisi ekstrem. Inflasi yang tinggi akan menurunkan pendapatan riil masyarakat sehingga daya konsumsi menurun drastis. Hal ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan menimbulkan kebangkrutan di berbagai sektor usaha. Oleh sebab itu, inflasi dianggap sebagai penyakit ekonomi yang membutuhkan kebijakan khusus untuk menanggulangnya (Jogiyanto, 2016; BPS, 2016; Manurung & Rahardja, 2004).

Jenis inflasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan hiperinflasi. Inflasi merayap ditandai dengan kenaikan harga di bawah 10% per tahun dan masih dapat dikendalikan. Inflasi menengah terjadi dengan kenaikan harga cukup besar dalam periode tertentu, biasanya double digit atau triple digit, yang membuat masyarakat enggan memegang uang tunai. Hiperinflasi merupakan kondisi kenaikan harga yang sangat cepat hingga nilai uang merosot drastis dan hanya dihargai jika segera ditukar dengan barang. Faktor penyebab inflasi dapat berupa tarikan permintaan, desakan biaya, maupun inflasi impor. Selain itu, inflasi juga dapat dipicu oleh ekspektasi masyarakat dan kebijakan harga tertentu. Indikator utama inflasi dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen yang disusun berdasarkan survei biaya hidup masyarakat. Dengan demikian, inflasi memiliki dimensi penyebab, dampak, serta indikator pengukuran yang kompleks dalam perekonomian (Nopirin, 2000; Sukirno, 2012; Putong, 2013).

### **Pendapatan Perkapita**

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam analisis pembangunan ekonomi karena mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Konsep ini didefinisikan sebagai jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam periode tertentu setelah dikurangi biaya-biaya. Pendapatan ini dihitung dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar daya beli masyarakat, sehingga kesejahteraan meningkat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita digunakan untuk menggambarkan jurang kemakmuran antarnegara. Selain itu, pendapatan per kapita juga mencerminkan kemampuan suatu negara menyediakan barang dan jasa bagi penduduknya. Dengan demikian, indikator ini menjadi acuan penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2005).

Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan per kapita antara lain permintaan dan penawaran agregat, tingkat konsumsi, tabungan, serta investasi. Permintaan agregat menggambarkan total barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian, sedangkan penawaran agregat mencerminkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Konsumsi dan tabungan memiliki hubungan erat dengan pendapatan karena pengeluaran konsumsi mencerminkan penggunaan pendapatan, sementara tabungan merupakan bagian pendapatan yang ditunda penggunaannya. Investasi berperan penting karena meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan output nasional. Selain itu, faktor jumlah penduduk sangat memengaruhi pendapatan per kapita karena semakin besar jumlah penduduk, semakin kecil pendapatan rata-rata jika pertumbuhan ekonomi tidak sebanding. Oleh sebab itu, pengelolaan faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan pendapatan per kapita sebagai indikator strategis bagi kebijakan pembangunan nasional (Rasyid, 2003).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang mencerminkan perkembangan kapasitas produksi suatu negara. Konsep ini menekankan aspek proses, output per kapita, dan jangka panjang sehingga menggambarkan dinamika perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Indikator utama yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam teori Harrod-Domar, investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan karena

dapat meningkatkan kapasitas produksi. Teori pertumbuhan juga menyoroti peran teknologi, institusi, dan modal manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2000).

Faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal tidak hanya berupa modal fisik seperti mesin dan infrastruktur, tetapi juga modal manusia yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif jika disertai peningkatan produktivitas dan penyediaan lapangan kerja, namun sebaliknya dapat menimbulkan pengangguran jika tidak diimbangi. Kemajuan teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, inovasi, serta daya saing ekonomi. Dalam teori Solow, teknologi dianggap sebagai faktor eksogen, sedangkan teori pertumbuhan endogen Romer menekankan peran riset, pengembangan, dan pendidikan tinggi sebagai sumber inovasi. Indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional riil dan pendapatan per kapita riil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor produksi, penduduk, dan teknologi (Arsyad, 1999).

### **Upah Minimum Regional (UMR)**

Upah Minimum Regional (UMR), yang kini dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan standar upah terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja berdasarkan peraturan pemerintah. UMR ditetapkan untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapan UMR dipengaruhi oleh faktor kebutuhan hidup layak, inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta kondisi ekonomi daerah. Selain itu, UMR juga mempertimbangkan indeks harga konsumen dan pertumbuhan ekonomi regional yang tercermin dari PDRB. Tujuan utama UMR adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperbaiki daya beli, dan menciptakan pemerataan pendapatan. Secara mikro, UMR berfungsi sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, sementara secara makro bertujuan mendorong stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, UMR menjadi instrumen kebijakan yang penting dalam hubungan industrial (Suparmoko, 2009).

Faktor-faktor yang memengaruhi UMR meliputi kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kondisi perusahaan, serta kebijakan pemerintah. KHL menjadi acuan utama dalam menetapkan UMR karena mencerminkan standar minimal kebutuhan pekerja. Inflasi juga harus diperhitungkan agar upah tetap seimbang dengan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi pertimbangan karena mencerminkan kemampuan finansial wilayah dalam mendukung standar upah. Selain itu, produktivitas pekerja turut menentukan tingkat upah karena perusahaan cenderung memberikan kompensasi lebih tinggi kepada tenaga kerja yang efisien. Faktor kemampuan perusahaan juga penting agar penetapan UMR tidak membebani operasional usaha. Dengan demikian, penetapan UMR harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan perusahaan (Syam & Wahab, 2015).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dengan fokus pada analisis pengaruh inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional terhadap penerimaan pajak pada periode 1990–2023. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dalam bentuk angka yang mencerminkan nilai variabel penelitian, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak Aceh, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh. Data ini mencakup tingkat inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, UMR, dan realisasi penerimaan pajak di Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan memanfaatkan catatan, laporan, serta literatur dari berbagai sumber akademik maupun publikasi resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memungkinkan pengolahan data dengan rumus statistik untuk menguji hipotesis, serta menggambarkan hubungan antarvariabel secara signifikan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tujuan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat agar model regresi yang digunakan memenuhi kriteria. Analisis ini digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan UMR berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Aceh. Regresi linier berganda dipilih karena sesuai untuk penelitian dengan variabel bebas lebih dari satu. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui hubungan signifikan antarvariabel, baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan temuan empiris mengenai pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap penerimaan pajak di Aceh.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum

Penerimaan pajak di Aceh merupakan fondasi utama dalam struktur fiskal daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai provinsi yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah” dan terbagi ke dalam 18 kabupaten serta 5 kota, Aceh memiliki dinamika penerimaan pajak yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan regulasi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti oleh pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame yang memperkuat basis pendapatan terutama di kawasan perkotaan dan pariwisata. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat juga memberikan kontribusi signifikan, meskipun nilainya bergantung pada fluktuasi penerimaan pajak nasional, khususnya dari PPh dan PPN. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak serta stabilitas keuangan daerah Aceh.

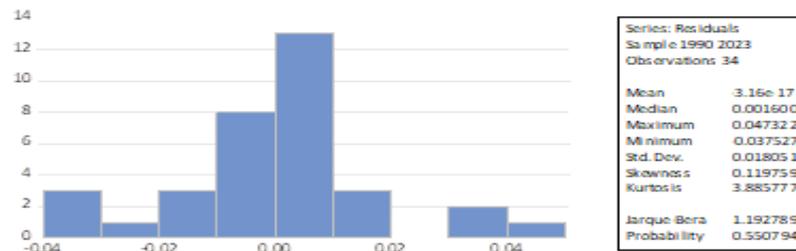
### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	0.985723	0.020286	48.59052	0.0000
<b>Inflasi</b>	-6.10E-05	0.000271	-0.225188	0.8234
<b>Pendapatan Perkapita</b>	0.100449	0.046914	2.141143	0.0408
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	-0.000330	0.001505	-0.219088	0.8281
<b>UMR</b>	2.60E-08	4.85E-09	5.362896	0.0000

Persamaan regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, pendapatan per kapita dan upah minimum regional berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel di atas dihasilkan nilai JB sebesar 1.962789 dengan probabilitas sebesar 0,550794 > 0,05 yang berarti nilai ini lebih besar dari nilai signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.727256	Prob. F (14,19)	0.0218
Obs*R-squared	22.70266	Prob. Chi-Square (14)	0.0653
Scaled explained SS	23.83129	Prob. Chi-Square (14)	0.0480

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan bahwa nilai probabilitas chi-kuadrat sebesar 0.0653 lebih besar dari 0.05. Karena nilai chi-kuadrat lebih besar dari  $\alpha$ , dapat dikatakan bahwa data tersebut bersifat homokedastisitas dengan tidak adanya heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Null hypothesis: No serial correlation at up to p-order

lags

F-statistic	1.6319
Obs*R-squared	1.8725
Prob. Chi-Square	0.1712

Berdasarkan hasil uji terlihat bahwa p-value Prob. Chi-Square 0.1712 > 0.05. sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat bukti cukup untuk menyimpulkan adanya autokorelasi dalam hasil regresi.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>
<b>X1</b>	1.0	-0.308	-0.194	-0.352
<b>X2</b>	-0.308	1.0	-0.393	0.945
<b>X3</b>	-0.194	-0.393	1.0	-0.281
<b>X4</b>	-0.352	0.945	-0.281	1.0

Berdasarkan hasil matriks korelasi, diketahui bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah angka 0,95. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi tidak adanya multikolinearitas, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis regresi berganda.

**Uji Hipotesis****Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)**

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	0.985723	0.020286	48.59052	0.0000
<b>Inflasi</b>	-6.10E-05	0.000271	-0.225188	0.8234
<b>Pendapatan Perkapita</b>	0.100449	0.046914	2.141143	0.0408
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	-0.000330	0.001505	-0.219088	0.8281
<b>UMR</b>	2.60E-08	4.85E-09	5.362896	0.0000

Berdasarkan hasil penelitian, inflasi di Aceh tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak selama periode 1990–2023. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa tidak secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Sebaliknya, pendapatan per kapita terbukti memiliki pengaruh signifikan, yang berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi di Aceh tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga laju pertumbuhan output daerah belum cukup kuat memengaruhi pajak yang terkumpul. Upah Minimum Regional (UMR) justru berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya, kenaikan UMR berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sekaligus memperluas basis pajak. Secara keseluruhan, variabel pendapatan per kapita dan UMR berperan penting dalam memengaruhi penerimaan pajak di Aceh.

**Uji Hipotesis Analisis Simultan (Uji F)**

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.827295	Mean dependent var	1.054565
Adjusted R-squared	0.803474	S.D. dependent var	0.043436
S.E. of regression	0.019256	Akaike info criterion	4.926939
Sum squared resid	0.010753	Schwarz criterion	4.702475
Log likelihood	88.75797	Hannan-Quinn criter.	4.850390
F-statistic	34.72910	Durbin-Watson stat	2.194249
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dapat dilihat bahwa nilai probability UMR adalah  $0.0000 < 0.05$  yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai sig. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang menunjukkan bahwa inflasi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan UMR dari tahun 1990-2023 memiliki pengaruh signifikan penerimaan pajak di Aceh 1990-2023.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil regresi pada tabel 6 menghasilkan nilai Adjusted R-squared yang disesuaikan sebesar 0.8272, Kemampuan variabel independen yaitu inflasi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan UMR dalam memengaruhi variabel dependen penerimaan pajak tahun 1990-2023 adalah sebesar 82.72%, berdasarkan nilai Adjusted R-squared yang disesuaikan dalam penelitian ini sisanya sebesar 17.28% dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Aceh

Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat menurunkan daya beli masyarakat serta memengaruhi nilai riil penerimaan pajak. Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Aceh selama periode 1990–2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan harga yang terjadi tidak cukup kuat untuk memengaruhi penerimaan pajak secara nyata. Meskipun inflasi berpotensi meningkatkan nilai nominal transaksi yang dikenakan pajak, daya beli masyarakat yang melemah justru menekan konsumsi. Hal tersebut berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi sehingga penerimaan pajak riil tidak mengalami peningkatan yang berarti. Selain itu, ketidaksiapan sistem perpajakan dalam merespons inflasi juga menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu, inflasi di Aceh lebih banyak berperan sebagai faktor penekan daripada pendorong penerimaan pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga menyatakan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sitinjak menemukan hal yang sama dalam analisisnya pada periode 2000–2013 di Indonesia. Penelitian Umniati di Kota Bandung serta Hartono juga mendukung kesimpulan bahwa inflasi bukanlah variabel yang dominan. Kesamaan hasil ini memperlihatkan adanya pola bahwa inflasi lebih berhubungan dengan aspek daya beli daripada aspek pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga agar dampaknya terhadap penerimaan pajak tidak semakin melemahkan. Inflasi yang terlalu tinggi justru berisiko mempersempit basis pajak akibat menurunnya konsumsi. Dengan demikian, stabilitas ekonomi makro perlu terus diperhatikan.

#### Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak di Aceh

Pendapatan per kapita merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kemampuan daya beli rata-rata penduduk. Dalam penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Aceh. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap penerimaan pajak. Peningkatan pendapatan mendorong konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak seperti PPN. Selain itu, meningkatnya penghasilan masyarakat juga berdampak pada potensi penerimaan pajak penghasilan. Kondisi ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan kemampuan membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan per kapita menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berhubungan positif dengan penerimaan pajak. Umniati menemukan hubungan signifikan di Kota Bandung, sementara Fadhilah dan rekan-rekannya

membuktikan hal serupa pada negara-negara BRICS. Penelitian lain oleh Herawati dan Saipudin di Kalimantan juga memperlihatkan pengaruh signifikan yang konsisten. Dengan adanya kesesuaian hasil ini, dapat dipahami bahwa pendapatan per kapita tidak hanya berperan sebagai indikator ekonomi, tetapi juga pendorong penerimaan pajak. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hal ini dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kenaikan pendapatan masyarakat yang merata akan memperluas basis pajak tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan harus terus diperkuat.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Aceh**

Pertumbuhan ekonomi secara umum dianggap sebagai indikator penting yang mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak suatu wilayah. Namun, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Bahkan koefisien pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi di Aceh kurang mampu memberikan kontribusi nyata pada penerimaan pajak. Sektor-sektor dominan dalam pertumbuhan belum sepenuhnya terintegrasi dengan basis perpajakan. Selain itu, lemahnya transmisi pertumbuhan terhadap penerimaan pajak menunjukkan adanya hambatan administratif dan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Aceh belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan hal serupa. Huda dan Nurhayati menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah dengan dominasi sektor informal tidak selalu berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Nugroho juga menyatakan bahwa struktur ekonomi yang belum optimal membatasi pengaruh pertumbuhan terhadap pajak. Rahmawati menambahkan bahwa faktor kelembagaan seperti efisiensi sistem perpajakan lebih dominan dibanding indikator makroekonomi. Kesamaan hasil ini menegaskan pentingnya memperhatikan aspek struktural dan institusional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menjamin peningkatan pajak jika basis pajak tidak diperluas. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan di Aceh perlu diarahkan untuk memperkuat kaitan antara pertumbuhan dan pajak.

### **Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Penerimaan Pajak di Aceh**

Upah Minimum Regional (UMR) berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan pekerja sekaligus memengaruhi penerimaan pajak. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Aceh. Setiap kenaikan UMR memberikan dampak langsung pada peningkatan potensi pajak, baik PPh Pasal 21 maupun PPN dari konsumsi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang berimplikasi pada naiknya transaksi ekonomi. Selain itu, kenaikan UMR juga memperluas basis pajak karena lebih banyak pekerja masuk ke dalam kategori wajib pajak. Dengan demikian, UMR terbukti menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Temuan ini menunjukkan peran kebijakan ketenagakerjaan dalam mendukung penerimaan pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan adanya hubungan positif antara UMR dan penerimaan pajak. Rohadi menemukan bahwa UMR berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kediri. Mutholib dan Nuridah bersama timnya juga menunjukkan bukti serupa di wilayah penelitian masing-masing. Walaupun penelitian-penelitian tersebut berfokus pada PBB-P2, logika peningkatan pendapatan akibat UMR tetap relevan dengan jenis pajak lain. Hal ini menunjukkan bahwa UMR tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi fiskal daerah. Pemerintah daerah dapat menjadikan kebijakan UMR sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja dan penerimaan negara dapat berjalan beriringan.

### Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap penerimaan pajak di Aceh periode 1990–2023, dan hasilnya menunjukkan bahwa inflasi serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga fluktuasi keduanya tidak memberikan dampak nyata terhadap penerimaan pajak, sementara pendapatan per kapita terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan yang mencerminkan bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat turut memperkuat kontribusi penerimaan pajak, serta UMR juga memberikan pengaruh positif dan signifikan di mana kenaikan upah minimum mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pendapatan per kapita dan UMR merupakan determinan penting dalam memperkuat basis penerimaan pajak di Aceh. Secara simultan, inflasi, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan UMR mampu menjelaskan sebesar 80.34% variasi dalam penerimaan pajak di Aceh, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

### Referensi

- Ahmad Ma'aruf, & Latri Wihastuti. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan Dan Prospeknya*, J. 9(1).
- Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, & Melania Kiswandari. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Rajagrafindo Persada.
- Aulia Pohan. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Di Indonesia*. Pt Raja Grafindo Prersad.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFPE.
- Crane, Steven E. Dan Nourzad, Farrokh. (1986). *Inflation and Tax Evasion: An Empirical Analysis*. 68(2).
- Fadhilah. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Federal Tax Service, & Mishustin, M. V. (2016). *Factors of Growth of Tax Revenues: A Macroeconomic Approach*. *Economic Policy (In Russian)*, 11(5), 8–27. <https://doi.org/10.18288/1994-5124-2016-5-01>
- Imam Ghozali. (N.D.). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*.
- Jogiyanto Hartono. (2016). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. BPFPE.
- Joni Bambang. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Pustaka Setia.
- Kemenkeu, D. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan Iii 2020*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan Ii 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Lincoln Arsyad. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Stie YKPN.
- M. Kadarisman. (2012). *Manajemen Kompensas*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Mandala Manurung, & Pratama Rahardja. (2004). *Uang, Perbankan, Dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia*. Feui.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa)*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216-229
- Michael Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Nanang Rohadi. (2020). *Pengaruh Umr, Jumlah Penduduk, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pbb-P2 Di Kota Kediri*. *Universitas Siliwangi*, 1(2).
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter Buku 2 Edisi Pertama*. BPFPE.

- Norman Duma Sitinjak. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, Dan Pertumbuhan Pdb Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak. xi (2), 166–171.
- Paul A. Samueelson. (1992). Ekonomi Makro. Erlangga.
- Putong, I. (2013). Economics Pengantar Mikro Dan Makro. Mitra. Wacana Media.
- Rahardjo Adisasmita. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah. Graha Ilmu.
- Rahayu, D. (2015). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. 18(30).
- Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. 2018. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis 9 (1), 84-91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>.
- Sadono Sukirno. (2005). Makro Ekonomi Modern (Edisi Pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. (2011). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. (2012). Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Pt Raja Grafind.
- Saha, A. (2022). Impact of Inflation on Consumption Pattern of Households. Pragati: Journal of Indian Economy, 9(2), 66–78. <https://doi.org/10.17492/Jpi.Pragati.V9i2.922204>
- Suherman Rasyid. (2003). Pengantar Teori Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukidin Dan Mundir. (2005). Metode Penelitian: Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian. Insan Cendekia.
- Suparmoko. (2009a). Pengantar Ekonomika Makro. BPFE.
- Suparmoko. (2009b). Pengantar Ekonomika Makro. BPFE-Yogyakarta.
- Sutrisno Badri. (2012). Metode Statistika Untuk Penelitian Kuantitatif. Penerbit Ombak.
- Syahrina Syam, & Abdul Wahab. (2015). Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar. 1(1).
- Syofian Siregar. (N.D.). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17 (1st Ed). Bumi Aksara.
- Zainal Asikin. (2012). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. PT Rajagrafindo Persada.